

Evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Hendri Rindra Wahyudi

12040674055 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: hendri.rindra@yahoo.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

0029077404 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: prabawatiindah@yahoo.com

Abstrak

Anti Poverty Program (APP) merupakan salah satu kebijakan percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur. Desa Kanor Kecamatan Kabupaten Bojonegoro menjadi sasaran lokasi pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan. Pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan masih terdapat kendala yakni belum tersedia mitra usaha, tidak maksimalnya peran Konsultan Teknis Kecamatan dalam memberi pendampingan dan pembinaan kepada Pokmas sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan program atau hasil dari program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi program CIPP (*context, input, process, product*) oleh Daniel L. Stufflebeam. Yang menjadi subyek penelitian yakni Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Konsultan Teknis Kecamatan, Pendamping Kelompok Masyarakat, dan anggota Pokmas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan dilihat dari aspek konteks yakni alasan menetapkan tujuan sudah tepat, sarana dan prasarana sudah tercukupi, telah memperhatikan peluang yang akan dicapai, memperhatikan kondisi yang ada. Dilihat dari aspek masukan yakni sumber daya dan strategi yang digunakan telah cukup mendukung tercapainya tujuan, pihak-pihak yang terlibat telah melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Dari aspek proses telah terjalin hubungan dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program, serta terdapat kendala atau permasalahan yang meliputi semangat dan motivasi Pokmas rendah, harga pakan ikan mahal, dan belum ada mitra usaha. Dilihat dari aspek hasil telah memberikan peningkatan pendapatan Pokmas.

Saran yang diberikan adalah perlu adanya mitra usaha yang berperan sebagai pembeli hasil produk Pokmas, perlunya peningkatan peran dari Konsultan Teknis Kecamatan khususnya dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokmas, perlu adanya pendampingan dan pembinaan lebih sering dan berkala agar anggota Pokmas mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi.

Kata kunci: evaluasi, Program Anti Kemiskinan, Perikanan.

Abstract

Anti-Poverty Program (APP) is one of the acceleration policy addressing poverty in East Java. Kanor Village district of Bojonegoro is a target location of the implementation of the Anti-Poverty Program (APP) Fisheries Sector. Implementation of Anti-Poverty Program (APP) Field of Fisheries, there are still obstacles that are not yet available business partners, not maximum Subdistrict Technical Consultant role in providing assistance and guidance to community groups that need to be evaluated to determine and assess the implementation of the program or the results of the program. The purpose of this study was to describe the evaluation of Anti-Poverty Program (APP) Field of Fisheries in the Kanor village district of Bojonegoro.

This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research using CIPP program evaluation model (*context, input, process, product*) by Daniel L. Stufflebeam. Which became the subject of the research staff Bappeda Bojonegoro Economics, Department of Animal Husbandry and Fisheries staff Bojonegoro, Technical Consultant Districts, Companion Community Groups, and members of community groups. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by means of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that the evaluation of Anti-Poverty Program (APP) Field of Fisheries from the aspects of the context of the grounds set goals are appropriate, facilities and infrastructure are fulfilled, have noticed the opportunities that will be achieved, considering the conditions that exist. Viewed from the aspect

of resource inputs and strategies used have been sufficient to support the achievement of objectives, the parties involved have done their respective jobs well. From the aspect of the process has been intertwined relationships and better coordination in the implementation of the program, and there are obstacles or problems that include Pokmas spirit and motivation is low, the price of fish feed is expensive, and there is no business partners. An examination of the results has provided increased revenue Pokmas.

Advice given is the need for business partners who act as buyers of the product of Pokmas, the need to increase the role of Technical Consultants Subdistrict especially during the mentoring and guidance to community groups, the need for mentoring and coaching more often and regularly so that members of community groups have the spirit and high motivation.

Keywords: Evaluation, Anti-Poverty Program, Fisheries.

Pendahuluan

Tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Negara mempunyai kewajiban menanggulangi permasalahan kemiskinan, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh rakyat.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu upaya-upaya penanggulangan kemiskinan harus ditujukan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS) jumlah penduduk di Indonesia sebesar 255.182.144 jiwa. Persebaran jumlah penduduk tersebut paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 46.668.214 jiwa, kemudian persebaran penduduk terbesar kedua berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 38.828.081 jiwa dan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebesar 33.753.023 jiwa. Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) sebesar 28.513.570 juta jiwa atau 11,13 % dari jumlah penduduk Indonesia (<http://bps.go.id/diakses> pada tanggal 15 Januari 2016).

Di tingkat pemerintah daerah upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. *Anti Poverty Program* (APP) adalah merupakan salah satu kebijakan percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur. Konsep dasar *Anti Poverty Program* (APP) adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin yang difasilitasi pendampingan dan mitra usaha sebagai penampung / pembeli hasil produksi Kelompok Masyarakat (Pokmas). Tujuan umum adalah penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha kelompok masyarakat miskin dengan pola

kemitraan yang berbasis *cluster* (Pedoman Umum *Anti Poverty Program* 2015).

Sasaran program adalah kelompok masyarakat Rumah Tangga Miskin dan atau Rumah Tangga Hampir Miskin dan atau Rumah Tangga Kelompok 1 (desil 1) dan atau Kelompok 2 (desil 2) berdasarkan data PPLS 2011 (*by name by address*) yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif berbasis *cluster* yang sasaran difasilitasi dengan Mitra usaha untuk memasarkan hasil produknya dalam rangka peningkatan pendapatan Kelompok Masyarakat miskin (Pedoman Umum *Anti Poverty Program* 2015).

Anti Poverty Program (APP) Jawa Timur terdiri dari lima bidang yaitu bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perindustrian, bidang perkebunan, dan bidang kehutanaan. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang menggulirkan *Anti Poverty Program* sejak tahun 2006. Di kabupaten Bojonegoro ada tiga kecamatan yang ditunjuk sebagai penerima *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan yaitu kecamatan Balen yang berada di Desa Sekaran, Kecamatan Kalitidu tepatnya di Desa Ngringin Rejo, dan kecamatan Kanor berada di Desa Kanor. Desa Kanor merupakan sasaran lokasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan yang menjadi paling baik dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bojonegoro.

Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro berupa kegiatan berkelanjutan budidaya ikan lele yang disertai dengan kegiatan: (1) pemberian hibah sarana produksi sebagai penunjang kegiatan APP; (2) pelatihan-pelatihan Pokmas dalam bidang manajerial Pokmas, pengetahuan wirausaha, peningkatan kemampuan sumber daya manusia; (3) pendampingan rutin dalam bidang pembukuan, keterampilan teknis.

Meskipun *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor menjadi yang paling baik namun tidak lepas dari kendala yang terjadi. Permasalahan yang terjadi selama *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan berjalan di Desa Kanor adalah belum ada Mitra usaha.

Belum tersedianya Mitra usaha yang mengajukan fasilitas kredit usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman umum *Anti Poverty Program* (APP). Permasalahan lain yang terjadi selama *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan berjalan di Desa Kanor adalah tidak berjalannya peran Konsultan Teknis Kecamatan dalam melakukan pendampingan terhadap Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Dengan masih terdapatnya permasalahan bisa menghambat tujuan program, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan program kebijakan atau hasil dari sebuah program tersebut. Evaluasi adalah proses memperoleh data, melaporkan, dan menyediakan informasi mengenai suatu objek yang berguna untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi harus disertai tanggungjawab, melaksanakan praktek seefektif mungkin, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Dari latar belakang diatas sehingga judul penelitian ini adalah **“Evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?”.

Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1) **Manfaat Teoritis**
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.
- 2) **Manfaat Praktis**
 - a. **Bagi Universitas**
Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian selanjutnya khususnya yang sejenis dan tambahan referensi guna menambah serta

melengkapi kajian tentang implementasi suatu program pemerintah.

- b. **Bagi Petugas Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta kajian terkait tentang evaluasi *Anti Poverty Program* (APP) di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga kedepannya dapat dijadikan perbaikan dan saran untuk menyempurnakan implementasi kebijakan di masa yang akan datang.

- c. **Bagi Peneliti**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta wawasan baru tentang *Anti Poverty Program* (APP) dan menambah pengalaman serta keterampilan dalam melakukan penelitian sehingga nantinya dapat memahami sepenuhnya serta dapat menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapat.

Kajian pustaka

1. **Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye dalam Widodo (2006:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah”. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi demi teratasinya suatu persoalan publik.

2. **Evaluasi Kebijakan**

Jones dalam Widodo (2013:113), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Jadi evaluasi adalah aktivitas untuk menilai kebijakan publik hanya saja spesifikasi mengacu pada tujuan dan kriteria yang harus dievaluasi pada proses kebijakan publik. Sementara William N. Dunn (2003:608), mendefinisikan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

3. **Model Evaluasi Kebijakan**

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam adalah kerangka komprehensif dalam memandu kegiatan

evaluasi formatif dan sumatif, program, perseorangan, produk, instansi dan sistem. Inti dari model evaluasi CIPP ini adalah melihat evaluasi ke dalam empat dimensi evaluasi, yaitu:

a. Evaluasi Konteks (*context*)

Evaluasi konteks menyajikan data tentang alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan. Evaluasi ini menjelaskan mengenai lingkungan yang relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan diinginkan, dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang belum dimanfaatkan. Evaluasi ini pun menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program seperti karakteristik dan perilaku peserta didik, kurikulum, keunggulan dan kelemahan tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, pendanaan, dan komunitas. Evaluasi berkaitan pula dengan sistem nilai yang ada dan yang baru, menyajikan alat untuk menetapkan prioritas, serta perubahan-perubahan yang diinginkan.

b. Evaluasi masukan (*Input*)

Evaluasi masukan (*input*) menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan (dana), efektifitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. Evaluasi ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian kemampuan sistem yang digunakan dalam program; strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan program; dan rancangan implementasi yang dipilih.

Stufflebeam (Wirawan, 2011:93) mengemukakan bahwa evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan, evaluasi ini untuk mengidentifikasi problem, asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat dari program.

c. Evaluasi proses (*process*)

Evaluasi proses menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program, termasuk didalamnya pengaruh sistem dan keterlaksanaannya. Evaluasi ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya, menyediakan data untuk keputusan dalam implementasi program,

dan memelihara dokumentasi tentang prosedur yang dilakukan.

Model evaluasi ini berkaitan pula dengan hubungan akrab antar pelaksana dan peserta didik, media komunikasi, 4valuati, sumber-sumber, jadwal kegiatan, dan potensi penyebab kegagalan program. Dokumentasi tentang prosedur kegiatan pelaksanaan program akan membantu untuk kegiatan analisis akhir tentang hasil-hasil program yang telah tercapai.

Stufflebeam (Arikunto, 2008:47) menjelaskan evaluasi proses menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

d. Evaluasi hasil (*Prduct*)

Evaluasi produk mengukur dan menginterpretasikan pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Evaluasi ini berkaitan dengan pengaruh utama, biaya dan keunggulan program. Evaluasi produk berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Stufflebeam dalam Wirawan, 2011:94)

Metode Penelitian

Menurut sugiyono (2014 :2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Daniel L. Stufflebeam. Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti. Dalam hal ini, subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian yaitu Staf Bappeda Bojonegoro, Staf Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Konsultan Teknis Kecamatan APP, Pendamping Kelompok Masyarakat, anggota Pokmas. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dokumentasi.

Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Anti Poverty Program (APP) merupakan salah satu dari kebijakan percepatan kemiskinan di Jawa Timur yang digagas oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Timur. Secara umum tujuan *Anti Poverty Program* (APP) adalah penanganan penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli, melalui pemberdayaan usaha kelompok masyarakat miskin dengan pola kemitraan yang berbasis *cluster*.

Dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor telah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan berhasil memberdayakan kelompok masyarakat miskin untuk mengelola usaha ekonomi produktif berupa budidaya ikan lele. Kelompok masyarakat (Pokmas) juga mendapatkan fasilitas pendampingan selama program berjalan dari awal. Usaha budidaya perikanan yang dilakukan kelompok masyarakat (Pokmas) telah dapat memberikan peningkatan pendapatan meskipun hanya sedikit.

Selama *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor juga ada tidak terlepas dari kendala. Kendala yang terjadi seperti belum tersedianya mitra usaha. Peran dari mitra usaha adalah membeli produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) dan melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat (Pokmas). Selain itu juga kekurangan yang terjadi tidak maksimalnya peran Konsultan Teknis Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat (Pokmas). Kelompok masyarakat juga terkendala masalah pengelolaan biaya untuk melakukan budidaya ikan yang telah habis untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. biaya pakan yang mahal juga menjadi kendala bagi kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya ikan yang dijalankan.

Maka dari itu, perlu adanya evaluasi untuk mengevaluasi pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor dengan model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) yang dikemukakan Daniel L. Stufflebeam sebagai berikut:

1. Evaluasi konteks (*Context*)

a. Alasan menetapkan tujuan dan prioritas tujuan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan

Tujuan dilaksanakannya *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor telah sesuai dengan pedoman umum *Anti Poverty Program* (APP) yakni untuk mengembangkan

kelompok masyarakat miskin di Desa Kanor melalui usaha ekonomi produktif dan mengembangkan kemampuan dan peluang usaha agar memiliki pendapatan serta daya beli sehingga ada peningkatan kesejahteraan bagi kelompok sasaran. Dalam tahap ini juga telah dilakukan mekanisme pelaksanaan APP seperti yang tercantum dalam pedoman umum yakni telah dilakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat

b. Lingkungan yang relevan dengan pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan

Desa Kanor telah memenuhi syarat sebagai sasaran lokasi pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan yakni terdapat kelompok masyarakat kategori miskin dan hampir miskin berdasarkan data PPLS. Hal ini sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman umum program yakni telah dilakukan identifikasi anggota Pokmas yang sesuai dengan data PPLS. Selain itu juga telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan yakni telah dilakukan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini bermaksud untuk menggali usulan- usulan kegiatan usaha Pokmas.

c. Kondisi yang ada dan diinginkan dalam lingkungan pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan

Sebelum adanya *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor sudah ada masyarakat sekitar yang melakukan budidaya perikanan yang berhasil. Kondisi yang ada telah mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor. Dengan adanya sebagian masyarakat yang sudah berhasil melakukan kegiatan budidaya perikanan di Desa Kanor dapat ditularkan kepada kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan.

d. Kebutuhan yang belum terpenuhi

Kebutuhan yang belum terpenuhi adalah belum tersedianya mitra usaha. Keberadaan mitra usaha akan dapat membantu perkembangan Pokmas. Mitra usaha bertanggungjawab untuk membeli produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat dengan harga yang layak minimal sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya masyarakat juga membutuhkan usaha lain diluar usaha budidaya ikan lele karena jika hanya mengandalkan hasil dari budidaya ikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari hasil budidaya ikan lele hanya sedikit sehingga sifatnya hanya sampingan.

e. Peluang yang ingin dicapai

Peluang yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan di Desa Kanor adalah terbentuknya sentra perikanan. Akan tetapi peluang untuk menjadikan Desa Kanor untuk menjadi sentra perikanan masih belum bisa tercapai. Pokmas belum begitu banyak. Sedangkan untuk peluang pasar yang mudah telah dimanfaatkan oleh Pokmas dengan baik yakni terbukti ketika Pokmas menjual hasil ikan lele mereka. Untuk menjual ikan lele Pokmas cukup menghubungi tengkulak, kemudian tengkulak yang akan datang untuk membeli. elakukan pengembangan budidaya ikan lele.

f. Karakteristik dan perilaku Kelompok Masyarakat

Anggota Pokmas mempunyai karakter dan perilaku atau sikap yang berbeda dalam menjalankan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan. Tingkat motivasi anggota Pokmas dalam menjalankan program juga berbeda-beda.

g. Sistem Pendanaan pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan

Anggaran yang digunakan masih terbatas karena harus dialokasikan untuk bidang yang lain seperti bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kehutanan, dan bidang perdagangan sehingga belum bisa mencakup semua kelompok masyarakat miskin. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan berasal dari dua sumber yakni dari dana APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Bojonegoro.

2. Evaluasi Masukan (*Input*)

a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan

Sarana dan prasarana produksi yang digunakan dalam menjalankan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan sudah terpenuhi semua. Kelompok masyarakat (Pokmas) mendapat bantuan paket sarana dan prasarana produksi yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Timur. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan budidaya perikanan yang paling utama adalah kolam atau wadah untuk budidaya. Selain kolam sarana prasarana produksi yang tak kalah penting adalah benih ikan lele dan peralatan produksi seperti pompa air, seser, keranjang panen, dan obat-obatan. Sarpras penunjang yakni pembukuan serah terima bantuan, buku serah terima bantuan, buku kas harian, buku laporan pengembangan usaha, dan buku rekening bank. Semua sarana dan prasarana yang diterima oleh Pokmas telah sesuai ketentuan.

b. Penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan *Anti Poverty Program (APP)*

Sumber daya yang tersedia telah digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Sumber daya yang merupakan penunjang dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan adalah Pendamping Kelompok Masyarakat, Konsultan Teknis Kecamatan, Tim Teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Tim Koordinasi dari Bappeda Kabupaten Bojonegoro, dan Pokmas itu sendiri.

Sumber daya lain yakni sarana dan prasarana produksi yang diberikan kepada Pokmas juga telah cukup untuk digunakan melakukan budidaya ikan lele. Akan tetapi Pokmas tidak bisa melakukan pengembangan budidaya dengan cara menambah jumlah kolam karena modal yang dimiliki hanya cukup untuk satu kolam saja. Sumber daya yang juga penting dalam mendukung tercapainya tujuan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan di Desa Kanor adalah sumber daya keuangan. Anggaran yang digunakan untuk *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan telah cukup mendukung berjalannya *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan di Desa Kanor meskipun masih terbatas.

c. Strategi dalam mencapai tujuan *Anti Poverty Program (APP)*

Agar tujuan *Anti Poverty Program (APP)* dapat tercapai maka perlu dilakukan suatu strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dilakukan masing-masing pihak cukup baik guna menunjang keberhasilan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan di Desa Kanor. Masing-masing pihak mempunyai strategi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan di Desa Kanor.

Bappeda Bojonegoro sebagai Tim Koordinasi Kabupaten *Anti Poverty Program (APP)* melakukan koordinasi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* Bidang Perikanan.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro yaitu dengan melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan teknik budidaya ikan yang benar kepada Pokmas yakni terkait dengan cara melakukan penebaran benih ikan, cara melakukan pemeliharaan, dan perawatan atau penanganan terhadap penyakit yang menyerang ikan.

Pendamping Kelompok Masyarakat juga mempunyai strategi dengan selalu mendatangi anggota Pokmas untuk memantau perkembangan ikan lele. memberikan pinjaman pakan ikan kepada anggota Pokmas yang tidak punya modal untuk melakukan budidaya ikan lele. memberikan

pinjaman pakan ikan kepada. Masalah yang dirasakan oleh Pokmas adalah modal habis, Harga pakan ikan yang mahal, kebocoran kolam, Kemauan berusaha untuk berkembang dari sebagian anggota Pokmas juga kurang.

d. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor secara keseluruhan telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Tim Koordinasi/Tim Teknis melakukan koordinasi pelaksanaan APP di tingkat kabupaten, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APP. Tim Koordinasi/Tim Teknis juga melakukan sosialisasi kepada kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan APP, serta melaporkan pelaksanaan APP kepada Bupati secara berkala yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Provi Pihak yang juga mempunyai peran penting yakni Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM). Tugas dari Pendamping Kelompok Masyarakat adalah bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan Identifikasi anggota Pokmas yang sesuai dengan data PPLS; Melakukan identifikasi kebutuhan dalam menggali usulan-usulan kegiatan; Bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan musdes perencanaan, musdes pertanggungjawaban dan musdes perguliran; memberikan bimbingan teknis kepada Pokmas. Pendamping Kelompok Masyarakat (Pokmas) telah menjalankan tugasnya dengan baik terutama dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pokmas baik yang berkaitan dengan teknis budidaya ikan maupun dalam hal penyusunan laporan kegiatan, serta pembukuan lainnya.

Sementara itu Pokmas juga menjadi bagian penting yang terlibat dalam *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor. Pada tahun 2013 yang menjadi sasaran adalah Pokmas Niar Agung yang anggota berjumlah 5 orang. kemudian tahun kedua yang menjadi sasaran adalah Pokmas Kanorejo Ikan yang memiliki jumlah anggota 5 orang.

3. Evaluasi proses (*process*)

a. Hubungan antara pelaksana dengan kelompok sasaran penerima *Anti Poverty Program* (APP)

Dalam hal ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara kelompok masyarakat (Pokmas) dengan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM), Konsultan Teknis Kecamatan (KTK), dan Tim Koordinasi Kabupaten (Bappeda Bojonegoro dan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro). Secara umum telah terjalin hubungan komunikasi yang cukup baik antara Pokmas dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan.

Telah terjalin hubungan yang baik terjalin antara Pokmas dengan Pendamping Kelompok Masyarakat. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) sering memberi pendampingan dan bimbingan teknis budidaya seperti cara penebaran benih, perawatan dan penanganan dari gangguan penyakit. Intensitas pertemuan antara Pokmas dengan PKM juga sering karena lokasi tempat tinggal berada dalam satu desa.

Pokmas seharusnya juga mendapat pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi dari Konsultan Teknis Kecamatan. Tetapi pada kenyataan Konsultan Teknis Kecamatan jarang sekali datang memberikan pendampingan kepada Pokmas karena disebabkan mempunyai kesibukan lain. Sementara itu antara Pokmas dengan Tim Koordinasi/Tim Teknis juga telah terjalin hubungan yang baik. Tim Koordinasi/Tim Teknis telah memberikan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pelatihan kepada Pokmas agar pengelolaan program berjalan dengan baik.

b. Proses pendampingan/fasilitasi kepada kelompok sasaran penerima *Anti Poverty Program*

Secara keseluruhan pendampingan dan pembinaan yang diberikan kepada Pokmas sudah cukup baik yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknik budidaya ikan maupun keterampilan lain. Proses pendampingan kepada Pokmas dalam hal perencanaan usulan kegiatan juga telah dilakukan dengan baik. Pokmas telah didampingi dalam mengidentifikasi usulan-usulan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan peluang yang ada dan potensi yang dimiliki.

Pokmas telah memiliki kemampuan yang cukup memadai mengenai pengetahuan dan teknik budidaya seperti proses penebaran benih, cara pencegahan penyakit dengan menggunakan obat dan cara alternatif seperti menggunakan daun untuk mencegah penyakit, serta pembuatan pakan alternatif karena selain mendapat pendampingan dan pembinaan dari Pendamping Kelompok Masyarakat.

Selain pembinaan tentang teknik budidaya ikan juga ada pendampingan mengenai pembukuan dalam membuat laporan pengeluaran, hasil penjualan, membuat buku tamu, dan membuat daftar hadir rapat. Namun Pokmas masih belum mampu menyusun sendiri pembukuan mereka, sehingga yang menyusun sebagian besar pembukuan dan laporan adalah Pendamping Kelompok Masyarakat.

c. Pihak yang bertanggungjawab terhadap seluruh sumber daya pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP)

Semua pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing di setiap proses dan tingkatan. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan ini. Karena pelaksanaan program ini membutuhkan

koordinasi yang baik dari berbagai pihak sehingga semuanya mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pihak yang bertanggungjawab terhadap seluruh sumber daya dan proses pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan mulai dari pengelola yang paling tinggi yaitu Tim Pembina Provinsi diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Tim Koordinasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten, Tim Pembina Provinsi, Camat/Pokja kecamatan yang dibantu oleh Konsultan Teknis Kecamatan (KTK).

Ada juga Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-Prov) yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pembina Provinsi Jawa Timur, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota serta melakukan pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian terhadap Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) dan Pendamping Pokmas(PKM).

Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) bertanggung jawab kepada Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-Prov), dan melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Koordinasi Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten/Kota, Camat. Pihak yang penting juga dalam pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan adalah Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang bertanggung jawab kepada Konsultan Teknis Kecamatan dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Konsultan Teknis Kecamatan, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pokmas.

Pokmas sebagai kelompok sasaran penerima bantuan juga ikut bertanggungjawab. Pokmas bertanggungjawab terhadap perawatan dan pemeliharaan bantuan sarana produksi yang telah diberikan seperti pemeliharaan dan perbaikan kolam apabila mengalami kerusakan.

d. Potensi Penyebab kegagalan

Potensi penyebab kegagalan yakni permasalahan yang dihadapi selama berlangsungnya pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor. Masalah-masalah yang ada cukup berpotensi menyebabkan kegagalan program. Permasalahan pertama yang terjadi ketika pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor adalah karakteristik dan perilaku atau sikap dari Pokmas itu sendiri. Pokmas memiliki semangat yang berbeda dalam menjalankan usaha budidaya ada yang mempunyai keuletan untuk terus melakukan usaha budidaya tetapi juga ada yang tidak tahan banting ketika usaha budidaya mengalami masalah seperti ikan lelenya banyak yang mati.

Motivasi dari Pokmas untuk menjalankan usaha budidaya perikanan juga sering berubah.

Anggota Pokmas memiliki motivasi yang tinggi ketika didatangi oleh pendamping kemudian akan turun dengan sendirinya. Kemauan dan inisiatif anggota Pokmas untuk menjalankan usaha belum optimal. Potensi penyebab kegagalan selanjutnya adalah harga pakan yang mahal. Akibat mahalnya harga pakan anggota Pokmas tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan pengembangan usaha budidaya ikan lele. Permasalahan lain yang dapat juga menyebabkan kegagalan adalah penjualan belum menggunakan mitra usaha.

4. Evaluasi produk (Hasil)

a. Pencapaian *Anti Poverty Program*(APP) Bidang Perikanan

Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau pedoman yang ditetapkan terkait mekanisme pelaksanaan kegiatan yakni telah menentukan sasaran lokasi dengan terbentuknya Pokmas Niar Agung dan Pokmas Kanorejo Ikan sebagai penerima bantuan. Pokmas telah mempunyai usaha ekonomi produktif yang memiliki keberlanjutan di masa datang yaitu usaha budidaya ikan lele.

Pokmas juga telah mendapatkan pembinaan, pendampingan yang memadai selama program berjalan dua tahun yakni dari Pendamping Kelompok Masyarakat, Penyuluh Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Bappeda Bojonegoro. Adanya pembinaan dan pendampingan ini juga selaras dengan mekanisme pengembangan program APP yang tercantum dalam pedoman umum. Pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor juga telah dilakukan pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam pedoman umum program yakni dalam bentuk laporan proses pelaksanaan program secara berkala dan berjenjang.

Kegiatan usaha yang dilakukan kelompok masyarakat (Pokmas) dapat membantu meningkatkan pendapatan anggota Pokmas meskipun tingkat peningkatannya masih kecil. Adanya peningkatan pendapatan dapat diketahui karena telah dilakukan identifikasi pendapatan anggota Pokmas sebelum dan setelah terbantu APP seperti yang ditetapkan dalam pedoman umum program.

b. Pengaruh utama, biaya, keunggulan *Anti Poverty Program*(APP) Bidang Perikanan

Pengaruh utama untuk mencapai keberhasilan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor adalah Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM). Pendamping Kelompok Masyarakat sangat berperan penting dalam memberikan pendampingan kepada Pokmas. Pokmas pada awalnya belum mengetahui cara untuk melakukan budidaya yang benar sehingga sangat perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan.

Proses pelaksanaan *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan di Desa Kanor juga dipengaruhi oleh anggaran yang digunakan meliputi untuk pembelian bantuan sarana dan prasarana produksi, pendampingan berupa honor kepada konsultan, Pendamping Kelompok Masyarakat, pelestarian program dan operasional tim koordinasi kabupaten. Tanpa adanya dana dari pemerintah baik APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Bojonegoro *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan ini tidak bisa terlaksana dan tidak terjadi pengurangan kemiskinan. Keunggulan dari *Anti Poverty Program* (APP) adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) merupakan usulan dari Pokmas yang didampingi oleh Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang disesuaikan dengan dukungan dan potensi desa.

c. Identifikasi keluaran dan manfaat

Identifikasi keluaran dan manfaat ini mencakup keluaran yang muncul baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta manfaat yang muncul dirasakan selama adanya *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan. Kegiatan usaha yang dilakukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat membantu pendapatan anggota kelompok masyarakat (Pokmas). Peningkatan pendapatan anggota kelompok masyarakat (Pokmas) masih sedikit disebabkan belum begitu banyak pengembangan yang dilakukan Pokmas.

Manfaat dari adanya *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan salah satunya adalah memberikan kemandirian kepada usaha usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat (Pokmas) mendapat pendampingan selama program berlangsung sehingga diharapkan setelah program selesai kelompok masyarakat sudah bisa mandiri melakukan usaha budidaya ikan dan mampu mengembangkannya agar dapat memberikan peningkatan pendapatan sehingga bisa merubah kondisi menjadi lebih sejahtera.

Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dalam evaluasi konteks (*context*) tujuan sudah tepat sesuai dengan pedoman *Anti Poverty Program* (APP). Sedangkan kebutuhan yang belum terpenuhi adalah belum tersedianya mitra usaha dan Pokmas membutuhkan usaha lain diluar budidaya ikan lele. Peluang yang ingin dicapai yaitu terbentuknya sentra perikanan di Desa Kanor masih belum terwujud. Sedangkan karakteristik dan perilaku anggota Pokmas dalam menjalankan kegiatan budidaya ikan berbeda-beda.

Yang kedua evaluasi *input* (masukan), semua sarana dan prasarana produksi yang digunakan untuk usaha budidaya perikanan sudah cukup terpenuhi. Dalam hal ini sumber daya yang tersedia yakni meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan telah digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

Komponen evaluasi *process* (proses), proses ini bisa digambarkan melalui hubungan komunikasi yang terjalin baik antara Pokmas dengan Pendamping Kelompok Masyarakat, Tim Koordinasi/Tim Teknis Kabupaten serta telah terjalin koordinasi yang baik. Masalah yang berpotensi menyebabkan kegagalan diantaranya semangat dan motivasi sebagian anggota Pokmas rendah, harga pakan ikan yang mahal, serta belum ada jalinan mitra usaha resmi.

Komponen evaluasi *product* (hasil) yakni *Anti Poverty Program* (APP) Bidang Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau pedoman yang ditetapkan. Keunggulan program APP yakni usaha yang dijalankan Pokmas merupakan usaha produktif yang didasarkan potensi yang dimiliki serta mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi secara penuh dan difasilitasi dengan pendampingan.

b. Saran

Saran yang dapat dijadikan sebagai masukan yakni Dari segi komponen konteks yakni perlu adanya usaha lain yang dimiliki anggota Pokmas diluar budidaya ikan lele yang memiliki resiko kegagalan kecil. Di samping itu juga perlu adanya mitra usaha sebagai pembeli hasil budidaya ikan lele dari Pokmas dengan tingkat harga yang layak.

Dari segi komponen input perlunya pendampingan dalam pengelolaan keuangan Pokmas. Selain itu perlu adanya dukungan anggaran yang lebih. Strategi yang dilakukan oleh Pendamping harus bervariasi agar Pokmas memiliki semangat yang tinggi.

Dari segi komponen proses perlu adanya pendampingan dan pembinaan lebih sering dan berkala agar anggota Pokmas mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Selain itu perlunya peningkatan peran dari Konsultan Teknis Kecamatan khususnya dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pokmas dan juga harus ada koordinasi yang baik antara KTK dan PKM untuk bersama-sama melakukan pendampingan.

Dari segi komponen hasil perlu adanya pengembangan jumlah kolam agar pendapatan Pokmas meningkat. Selain itu juga perlu peningkatan kemampuan Pokmas dalam

menyusun pembukuan sehingga dapat dilihat perkembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safrudin Abdul. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bastian, Danny. 2009. "Pengaruh Program Anti Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan Petani (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Kabupaten Pacitan)". *Journal of Indonesia Applied Economics*. Vol. (2): hal. 121-134.
- Dewi, Bening Tyas Arum Sari. 2015. *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu Melati V RW V di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadilah, Eriza Nugrahvianti. 2015. *Evaluasi Pelatihan Instiusional pada Sub Kejuruan Listrik Industri di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Mojokerto*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Husna, S.M Auliya, Hermawan, dan Abdul Wachid. 2013. "Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG's (Millenium Development Goal) di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 (3): hal. 9-17.
- Karnaji. 2010. "Komitmen dan Konsistensi Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Lemiskinan: Analisis Kasus di Jawa Timur". Surabaya: Universitas Airlangga.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rondakarya.
- Mustofa, Ivan Beny. 2011. *Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan "Kampung Lele" dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT: Elex Media Komputindo.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidorajo: Banyumedia.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pedoman Umum *Anti Poverty Program (APP) Jawa Timur* Tahun 2015.
- www.statistikaindonesia.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/> diakses pada tanggal 29 April 2016